



Strategi Pemerintah dalam Membangkitkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Krisis Pandemi Covid-19

Aisyah Latifazzahra^{a,1*}, Bianca Alma Hafizha^{a,2}, Tandria Shinta Ayuningtyas^{a,3}, Augustin Rina Herwati^{a,4}, Kismartini^{a,5}

^a Universitas Diponegoro, Indonesia

¹ aisyaaatifa@yahoo.com

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 23 Desember 2021;

Revised: 6 Januari 2022;

Accepted: 23 Januari 2022.

Kata-kata kunci:

Kebijakan Pemerintah;

Pandemi Covid-19;

Strategi Pemerintah;

UMKM.

Keywords:

Government Strategy.

Covid-19 Pandemic;

The Government;

MSMEs.

: ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apa saja strategi pemerintah yang dilakukan untuk membangkitkan Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) beserta dampaknya. UMKM berperan penting bagi rakyat terutama membantu mengatasi pandemi Covid-19. Permasalahan yang dialami bisa berupa modal yang kurang, gulung tikar, pemecatan karyawan, dan lain sebagainya. Metode penelitian menggunakan kualitatif yang didapat berdasarkan hasil pengisian kuesioner melewati googleform yang diisi oleh pemilik UMKM di Semarang, serta pencarian data dari Bappenas dan LPI. Hasil yang didapat berupa penurunan tingkat penjualan UMKM yang begitu drastis serta banyaknya kerugian yang diterima oleh pihak usaha. Hal ini membutuhkan strategi pemerintah yang bijak agar dapat mengurangi dampak dari pandemi Covid-19 yang ada terhadap UMKM, seperti intensif pajak yang bijak, modal kerja, rekontruksi kredit, bantuan sosial, dan lain sebagainya. Tak lupa pemerintah juga dengan memberikan edukasi mengenai marketing untuk menghadapi era pandemi ini. Strategi pemerintah yang dilakukan cukup membantu UMKM bangkit dari dampak pandemi Covid-19.

ABSTRACT

The Government Strategy in Raising Usaha Mikro Kecil dan Menengah in the Covid-19 Pandemic Crisis. The purpose of this study is to find out what government strategies are carried out to raise Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) and their impacts. UMKM play an important role for the people, especially helping to overcome the Covid-19 pandemic. The problems experienced can be in the form of less capital, out of business, employee dismissal, and so forth. The research method uses qualitative obtained based on the results of filling out questionnaires through googleform filled out by MSME owners in Semarang, as well as data searches from Bappenas and LPI. The results obtained in the form of a decrease in the level of UMKM sales are so drastic and the number of losses received by the business. This requires a wise government strategy in order to reduce the impact of the existing Covid-19 pandemic on UMKM, such as wise tax intensive, working capital, credit reconstruction, social assistance, and so on. Do not forget the government also by providing education about marketing to face this pandemic era. The government strategy carried out is enough to help MSMEs rise from the impact of the Covid-19 pandemic.

Copyright © 2022 (Aisyah Latifazzahra dkk). All Right Reserved

How to Cite : Latifazzahra, A., Hafizha, B. A., Ayuningtyas, T. S., Herwati, A. R., & Kismartini. (2022). Strategi Pemerintah dalam Membangkitkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Masa Krisis Pandemi Covid-19 . *Rhizome* : *Jurnal Kajian Ilmu Humaniora*, 2(1), 34–42. <https://doi.org/10.56393/rhizome.v1i11.408>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami penurunan yang disebabkan adanya Covid-19 (Sugiri, 2020). Di awal tahun 2020, ada dampak langsung bagi perputaran perekonomian khususnya bagi UMKM. Covid-19 ditandai dengan munculnya gejala batuk kering, demam, sesak nafas, flu, diare, sakit kepala, mual dan muntah serta nyeri pada otot. Ada tercatat sudah terdapat 216 Negara, sedangkan kasus yang tercatat di Indonesia sebanyak 49.009 orang terkonfirmasi positif Covid-19 per tanggal 24 Juni 2020 (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2020).

Dampak dari Covid-19 yang semakin tinggi terutama dalam sektor perekonomian menyebabkan pemerintah memberlakukan kebijakan baru yaitu pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menuju kebiasaan new normal. Hal tersebut membuat para pelaku usaha UMKM harus membuat strategi baru untuk tetap bertahan dengan kondisi yang mengalami penurunan perekonomian. Kebijakan New Normal diharapkan mampu mengembalikan aktivitas bisnis termasuk UMKM, sehingga cepat atau lambat roda perekonomian dapat digerakkan kembali, hal ini juga berlaku bagi UMKM sehingga dapat menjalankan kembali usahanya yang tentunya dengan strategi baru yang tepat mengikuti kebijakan new normal. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan bahwa terdapat sekitar 163.713 UMKM yang terdampak Covid-19 (Novika, 2020). Pandemi Covid-19 telah membuktikan bahwa UMKM berperan penting terhadap perekonomian Indonesia (Rosita, 2020). Sektor UMKM dinilai paling tinggi dalam terkena dampak dengan adanya pandemi ini karena pada umumnya UMKM berpenghasilan dari perputaran dagangan yang dilakukan setiap hari. Ketika UMKM tidak mampu lagi menopang krisis ekonomi akibat pandemi, perekonomian Indonesia turun drastis selain akibat dari industri pariwisata dan manufaktur. Terdapat beberapa strategi kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dalam mengembangkan UMKM.

Hardilawati, (2020) berpendapat bahwa strategi yang dapat dilakukan oleh UMKM untuk bertahan yaitu dengan melakukan perdagangan secara *e-commerce*, seperti melakukan promosi secara digital, serta menjalin dan mengoptimalkan hubungan pemasaran. Mengingat Kota Semarang menjadi salah satu daerah di Indonesia yang terkena dampak dari pandemi Covid-19 sehingga berdampak serius pada aspek total produksi dan nilai perdagangan, serta jumlah tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaannya karena pandemi Covid-19 (Gultom, & Saragih, 2021). Adanya peningkatan kontribusi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap pendapatan nasional maupun daerah, pemerintah terus mengupayakan UMKM sebagai sektor yang berperan dalam keberlangsungan perekonomian. Berdasarkan data Pertumbuhan UMKM di Kota Semarang cukup terganggu dengan adanya pandemi Covid-19. Kota Semarang mengalami penurunan tingkat penjualan sektor UMKM di masa pandemi ini sebesar 36,7% yang mengancam UMKM gulung tikar akibat tidak adanya pergerakan dari penjualan usaha mereka, dan hanya 3,6% yang berhasil meningkatkan penjualannya. Bahkan terdapat sekitar 4,5% yang tidak mampu mengembangkan usahanya. Selain itu, ada sekitar 60% bahkan lebih, banyak UMKM yang mengalami kemerosotan dalam penjualannya (Amboningtyas, Taunay, & Rusmawati, 2021).

Di saat pailit ekonomi akibat virus Covid-19, pelaku usaha UMKM harus benar-benar teliti dalam mengambil keputusan. Diperlukannya strategi yang tepat supaya UMKM dapat bertahan di masa pandemi. Salah satu cara yang dapat dilakukan yaitu dengan teliti dalam pembukuan bisnis yang rapi. Seluruh transaksi dalam penjualan, baik pemasukan maupun pengeluaran, harus terstruktur dengan baik. Usaha kecil memanglah tidak mudah, namun harus tahan banting terhadap krisis ekonomi yang melanda. Karena itu dalam mengembangkannya, pemerintah juga harus ikut andil terhadap pengembangan usaha kecil menengah di Kota Semarang. Dengan cara seperti, menciptakan kondisi iklim usaha yang kondusif berupa keringanan pajak, adanya kemudahan perizinan, melakukan pengembangan kemitraan dan pelatihan, serta pembinaan kepada wirausaha. Dalam hal ini intinya pemerintah sangatlah berperan untuk memecahkan masalah rumit yang sering membuat UMKM

mengalami kesulitan, seperti akses pasar, memberikan modal dan teknologi, sehingga dalam pengembangan terhadap unit usaha kecil menengah yang terdiri dari kondisi kerja, akses informasi, akses pembiayaan, promosi usaha baru, peningkatan kualitas produk dan sumber daya manusia, dan meningkatkan ketersediaan layanan pengembangan usaha dapat membuat UMKM bangkit dan strategi bertahan selama krisis akibat pandemic Covid-19 dapat berhasil.

Dalam hal ini program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diselenggarakan secara optimis dalam upaya mengembangkan UMKM pada krisis Pandemi Covid-19. Dari penjelasan tersebut, tujuan penulis dalam penyusunan jurnal ini yaitu untuk melihat kondisi dan seberapa besar peran dari pemerintah dalam melakukan strategi kebijakan khususnya dalam mengembangkan UMKM pada Krisis Pandemi Covid-19 yang tentunya dilandasi dengan beberapa skema kebijakan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan pendekatan deskriptif karena penelitian ini mendeskripsikan bagaimana kebijakan pemerintah dan implementasinya dalam menangani masalah usaha kecil menengah (UMKM) di masa pandemi covid-19. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bukti, catatan atau laporan historis yang tersusun dalam arsip, dan berita-berita dari media massa. Peneliti menggunakan data sekunder berupa jurnal, penelitian terdahulu, artikel berdasarkan fakta, serta website yang akurat karena adanya pandemi Covid-19 membuat peneliti tidak memungkinkan untuk mencari data langsung di lapangan. Menurut Sugiyono (2014) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasinya.

Hasil dan Pembahasan

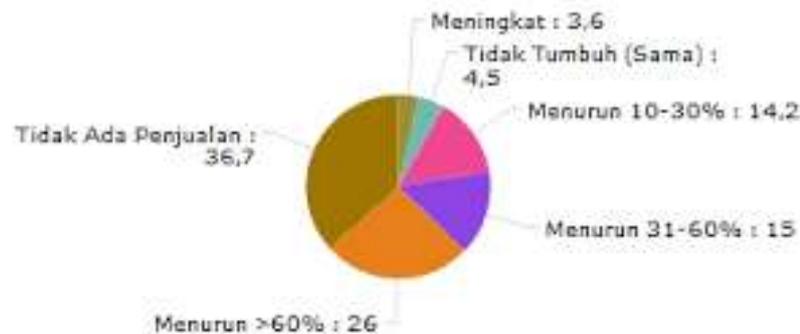
Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia memang sangat membawa dampak yang besar bagi sektor perekonomian, salah satunya usaha kecil menengah (UMKM). Seperti halnya di balik menurunnya pendapatan UMKM selama pandemi Covid-19, mengakibatkan para pelaku usaha mau tidak mau harus tetap mengembangkan usahanya. Dalam hal ini pemerintah terus giat dalam membangun kembali perekonomian dengan merancang strategi dalam pengembangan UMKM agar dapat bertahan di masa pandemi Covid-19, selain itu UMKM juga menjadi salah satu komoditas pembangunan perekonomian bangsa.

Upaya-upaya yang begitu banyak dilakukan pemerintah untuk mengembangkan persona UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di setiap daerah, begitu pun di Kota Semarang. Peran pemerintah begitu penting dalam menyalurkan stimulasi pada pelaku usaha UMKM tentunya berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku. UMKM pun merupakan salah satu orbit utama penunjang perekonomian di Indonesia. Dengan adanya UMKM tentunya akan membuka lapangan kerja baru serta dapat menambah devisa negara melewati pajak badan usaha. Sehingga begitu penting jika pemerintah terus berusaha untuk mempertahankan serta mengembangkan UMKM yang ada saat ini walaupun sedang diterjang oleh krisisnya pandemi Covid-19. Dalam mengembangkan UMKM di masa pandemi ini, tentunya pemerintah menerapkan beberapa kebijakan serta strategi-strategi tertentu.

Pembahasan pertama mengenai tujuan pengembangan UMKM. Tujuan adanya program pengembangan UMKM ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dalam keterampilan kewirausahaan dan kemampuan untuk menjalankan usaha kecil dan menengah. Program pengembangan UMKM dapat melatih para pelaku usaha untuk mengolah usaha mereka menjadi lebih kreatif dan inovatif, dapat

mengidentifikasi dan memilih proyek bisnis yang layak untuk dipasarkan, serta memperluas usaha yang telah dibangun untuk dapat lebih berkembang apalagi di saat pandemi Covid-19 seperti ini (Aminy, & Fithriasari, 2021).

Pembahasan kedua, terkait data dan informasi. Kelompok kami melakukan berbagai *research* terkait laju sektor UMKM di Kota Semarang. Dari data yang kami dapatkan, tim dari Asosiasi Business Development Service Indonesia, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melakukan survey dan mengumpulkan informasi terkait kondisi UMKM selama masa pandemi Covid-19.



Gambar 1. Penurunan Penjualan Sektor UMKM Akibat Covid-19

Pertumbuhan UMKM di Kota Semarang cukup terganggu dengan adanya pandemi Covid-19. Gambar yang sudah dipaparkan di atas memperlihatkan bahwa penurunan tingkat penjualan sektor UMKM di masa pandemi ini sangat terdampak dalam beberapa waktu ini. Sebesar 36,7% UMKM terancam bangkrut atau gulung tikar dikarenakan tak ada pergerakan dari penjualan usaha mereka, dan hanya 3,6% yang berhasil meningkatkannya. Lalu ada sekitar 4,5% yang tak dapat mengembangkan usahanya. Selain itu, ada sekitar 60% bahkan lebih, banyak UMKM yang mengalami kemerosotan dalam penjualannya.

Data yang dipaparkan tadi menunjukkan bahwa sangatlah dibutuhkan adanya usaha-usaha maupun kebijakan dari pemerintah untuk menunjang keberlangsungan UMKM. Mengingat UMKM ini memiliki peranan yang begitu penting demi perekonomian masyarakat, terlebih dalam masyarakat kecil. Upaya yang akan dilakukan pemerintah tentunya sangat berguna bagi kelangsungan hidup masyarakat tersebut, diantaranya seperti dapat meratakan tingkat perekonomian rakyat, mengentaskan masyarakat dari lubang kemiskinan, serta dapat juga untuk menunjang devisa negara.

Lalu terdapat juga data dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang melakukan kajian cepat akan dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja pegawai UMKM di Kota Semarang. Pelaku usaha yang menjadi mata pencaharian utama pada UMKM mengalami penurunan penjualan sebanyak 94,69%. Hal ini didasarkan pada skala usaha, tingkat penurunan penjualan lebih dari 75% dialami oleh 46% usaha menengah, 40% usaha kecil, 43% usaha mikro, dan juga 49% usaha ultramikro. Sementara itu, berdasarkan durasi lamanya usaha, penurunan penjualan lebih dari 75%, hal tersebut di antaranya, 9% usaha yang perjalanannya sudah lebih dari 10 tahun, lalu 11% usaha berusia 6-10 tahun, serta 23,3% usaha yang baru berusia 0-5 tahun turut serta mengalami penurunan.

Di sisi lain, tak semua usaha sektor bisnis mengalami penurunan, justru ada yang semakin berkembang pesat. Salah satu sektor bisnis yang justru berkembang dengan cepat ialah *e-commerce* yang memang beberapa tahun terakhir ini sudah cukup berkembang. Tidak dapat dipungkiri lagi, masyarakat cenderung lebih memilih berbelanja kebutuhan mereka melalui *e-commerce* yang notabenehnya harga barang maupun makanannya lebih terjangkau daripada beli toko atau market

tertentu. Terlebih dengan terjadinya pandemi Covid-19 ini, masyarakat turut lebih memilih membeli di *e-commerce* karena meminimalisir resiko tertular virus Covid (DPKM-UGM, 2020).

Pembahasan ketiga yaitu kebijakan pemerintah dan implementasinya. Hasil survei dari beberapa lembaga seperti Bappenas, BPS, dan World Bank memperlihatkan bahwa masa pandemi ini mengakibatkan banyaknya sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) mengalami kesulitan dalam menyanggupi pembayaran listrik, gas, dan gaji karyawan. Selain itu, banyak juga UMKM yang kesulitan dalam membayar pajak serta melunasi pinjaman-pinjaman yang dibutuhkan. Hal tersebut tentunya membuat kerugian besar terhadap laju bisnis, serta terkadang terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh atasan atau pemilik bisnis untuk tetap mempertahankan UMKM-nya

Kebangkitan serta kemajuan perekonomian Indonesia terlebih di Kota Semarang bisa dimulai dari pembinaan, bantuan, maupun kebijakan pemerintah untuk pengembangan UMKM yang ada di Kota Semarang dalam masa pandemi Covid-19. Pengembangan dari pemerintah untuk UMKM di masa pandemi ini sangat penting demi kelangsungan UMKM tersebut serta karena UMKM itu sendiri berperan penting dalam perekonomian, khususnya UMKM yang telah berkali-kali membuktikan resilience-nya ketika terjadi krisis ekonomi. Hambatan serta kendala lain yang terjadi juga antara lain kesulitan dalam mendapatkan bahan baku, pengunjung menurun, permodalan kurang, serta distribusi dan produksi terhambat (Niode, 2009).

Adanya beberapa dampak signifikan yang cenderung negatif tersebut, maka dari itu pemerintah Kota Semarang melakukan upaya serta kebijakan untuk meningkatkan performa ataupun untuk mengembangkan UMKM di Kota Semarang. Kebijakan tersebut diantaranya: pertama, intensif pajak. Intensif pajak dapat diartikan sebagai suatu kebijakan yang diatur oleh pemerintah yang memang tujuannya diperuntukkan kepada individu ataupun organisasi untuk mempermudah serta menyongsong kewajiban pajak demi meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar wajib pajak. Intensif pajak (*tax incentive*) bisa dikatakan sebagai penawaran dari pemerintah. Keuntungan yang didapatkan oleh pelaku bisnis dapat diterima dari pemberlakuan intensif pajak. Pemberlakuan kebijakan intensif pajak memberikan dampak baik bagi sektor bisnis sebagai pelaku ekonomi. Adapun kebijakan intensif pajak untuk sektor UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 diatur oleh PMK No.86 Tahun 2020.

Kebijakan kedua, bantuan sosial. Penyaluran bantuan sosial membutuhkan koordinasi, kerjasama, serta harmonisasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga swasta. Kerjasama tersebut haruslah efektif efisien dan didorong dengan akuntabilitas yang baik dalam penyaluran dana bansos tersebut, karena jika tidak pasti bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Kebijakan pemerintah dalam program bansos untuk UMKM yang terdampak Covid-19 di Kota Semarang mempunyai beberapa jenis, antara lain bantuan langsung tunai, pemberian bahan baku untuk produksi, serta juga pembelian produk UMKM itu sendiri oleh pemerintah Kota Semarang. Pemberian bantuan sosial memiliki visi misi untuk menanggulangi resiko sosial yang diakibatkan dari kejadian tertentu. Dapat dikatakan, bansos ialah suatu penyaluran dana atau bantuan yang dipunyai pemerintah yang akan diberikan untuk masyarakat beserta syarat dan ketentuan tertentu. Tujuan dari pemberian bantuan sosial tertulis dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/PMK.05/2021, yaitu sebagai rehabilitasi sosial, melindungi kepentingan sosial, pemberdayaan masyarakat, jaminan sosial, pemberantasan kemiskinan, serta mengatasi bencana (Widaryanti, & Pancawardani, 2020).

Kebijakan ketiga, modal kerja. Modal kerja adalah dana yang digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan dimana dana tersebut merupakan aset kelancaran yang dimiliki oleh pemilik usaha atau perusahaan. Sehingga masing-masing pelaku usaha berupaya untuk memenuhi kebutuhan modal kerjanya dengan tujuan dapat mencapai laba atau untung yang maksimal. Pada masa pandemi seperti ini, modal kerja akan terasa begitu penting demi pertahanan UMKM. Ada banyak pelaku usaha yang mendapat hasil penjualan tetapi hasil tersebut tidak bisa menutup pengeluaran untuk modal awal. Selain itu, ada beberapa juga UMKM yang tidak dapat mencakup persyaratan kredit yang ditetapkan dari bank

maupun bukan bank. Dalam hal ini, pemerintah mencetuskan kebijakan untuk menyalurkan modal kerja teruntuk pelaku UMKM yaitu pada PMK Nomor 104/PMK.05/2020 UMKM.

Kebijakan keempat, prioritas dukungan dengan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan program prioritas dukungan dari pemerintah. PEN dapat dikatakan sebagai salah satu solusi penting untuk menunjang UMKM dari tahun 2020 hingga sekarang, 2021. Pemulihan UMKM ini dapat dilakukan dengan insentif bagi UMKM dengan program-program yang ada dalam PEN. Hasil yang diharapkan dari program bahwa UMKM dapat bertahan ditengah dampak pandemi Covid-19 ini. Pemerintah Kota Semarang harus memastikan dana bantuan PEN harus benar dan tepat sasaran, karena dana tersebut terhitung tidak sedikit. Jenis dukungan prioritas lainnya merupakan usaha-usaha pemerintah dalam menanggulangi persoalan begitu banyaknya kementerian yang turut mengatasi UMKM yang terdampak pandemi. Tidak sedikit kementerian yang mempunyai program terkhusus untuk membantu UMKM.

Kebijakan kelima, percepatan vaksinasi. Upaya melakukan percepatan vaksinasi juga merupakan kebijakan pemerintah Kota Semarang untuk mendukung pemulihan kepercayaan konsumsi masyarakat, termasuk bagi pelaku serta karyawan UMKM. Vaksinasi dipercepat juga bertujuan untuk mencapai *herd immunity*. Pemerintah memaparkan bahwa tindakan preventif tersebut termasuk harus menerapkan protokol kesehatan serta percepatan vaksinasi. Sekarang ini, percepatan vaksinasi terus menjadi perhatian oleh pemkot dalam usahanya dalam membantu UMKM di masa pandemi Covid-19. Pemerintah turut menyediakan fasilitas layanan sentra vaksinasi untuk memulihkan UMKM di Semarang, serta mengapresiasi masyarakat yang patuh dan turut serta ber sukarelawan membantu keberjalanannya percepatan vaksin guna UMKM tetap produktif selama pandemi.

Kebijakan keenam, yaitu rekonstruksi kredit. Kebijakan pemerintah lainnya ialah rekonstruksi kredit. Untuk merekonstruksi kredit di UMKM, dilakukan dengan cara relaksasi penilaian kualitas aset dan menunda pokok dan subsidi bunga. Relaksasi penilai kualitas aset didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 dan 14/PJOK.05/2020. Lancarnya direstruturisasi yang dilakukan tanpa adanya batas jenis pembiayaan ataupun plafon menetapkan restrukturisasi kredit debitur yang terkena dampak pandemi Covid-19. Pemerintah pun memberlakukan penundaan pokok dan subsidi dengan memberi subsidi bunga maupun margin pada debitur UMKM dengan plafon kredit dan pembiayaan yang sudah ditentukan serta dengan jangka waktu yang ditentukan pula.

Pemerintah menerapkan kebijakan yang di dalamnya berisi upaya-upaya untuk memulihkan UMKM di Kota Semarang, dengan ekspektasi dapat membuka pintu peluang usaha yang lebih maju lagi untuk pelaku usaha. Jika kebijakan pemerintah dirasa sudah tepat, suatu sektor UMKM seharusnya juga mendukung kebijakan tersebut dengan cara tetap berusaha semaksimal mungkin, meningkatkan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM), meningkatkan inovasi, serta perluas jaringan promosi.

Pembahasan keempat, terkait faktor yang mempengaruhi perkembangan UMKM. Dalam rangka pengembangan UMKM, semua hal yang nantinya akan dilakukan tidak semata-mata merupakan langkah yang harus diambil oleh pemerintah dan menjadi kewajiban tanggung jawabnya. Pihak UMKM sebagai pihak yang memegang usahanya sendiri serta sebagai pihak internal pula, seharusnya memiliki inovasi untuk mengembangkan usahanya. Justru karena itulah, nantinya potensi yang mereka punyai mampu menciptakan pola pikir yang kreatif serta dapat memanfaatkan fasilitas dari pemerintah dengan sebaik-baiknya. Di kota Semarang, banyak UMKM yang menjalankan bisnisnya seperti bisnis makanan, pakaian, travelling, dan lain sebagainya. Tetapi selama masa pademi Covid-19 ini, bisnis UMKM di Kota Semarang cenderung menurun karena sepi peminat. Maka dari itu, pihak pengusaha harus memiliki pola pikir untuk segera meningkatkan penjualan mereka dengan cara-cara yang mereka lakukan. Cara atau faktor pendukung yang baik akan segera dapat memajukan UMKM yang semula menciut, menjadi lebih mempunyai harapan untuk berkembang lagi. Faktor-faktor tersebut di

antaranya: sumber daya manusia, strategi pemasaran, sistem kemitraan, sistem pengelolaan keuangan, budaya organisasi, kualitas infrastruktur dan regulasi.

Pembahasan kelima yaitu strategi yang dilakukan pemerintah dalam pengembangan UMKM. Adapun strategi yang dilakukan pemerintah untuk dapat bertahan dalam pengembangan UMKM sebagai berikut: pertama, supaya UMKM dapat bertahan dan berkembang di pandemi Covid-19 ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan seperti pemberian bantuan sosial kepada pelaku UMKM seperti memberikan insentif pajak, melakukan perpanjangan dan penataan kembali terhadap limit kredit, dan pemberian pembiayaan modal kerja. Kedua, pemerintah merupakan penunjang dalam penerapan UMKM dan pemberian pelatihan secara *e-learning*. Ketiga, memberikan edukasi kepada masyarakat supaya dapat lebih mendalami dan mempelajari mengenai digital marketing, sehingga dapat berinovasi seperti membuat media promosi untuk memasarkan jenis UMKM yang dimiliki di media sosial.

Strategi yang dilakukan pemerintah untuk dapat bertahan dalam pengembangan UMKM dengan adanya pemberian insentif dan subsidi memiliki tujuan untuk mengembalikan posisi sektor pasar. Pemerintah memberikan bantuan sosial merupakan salah satu bentuk untuk menyelamatkan UMKM pada masa pandemi Covid-19. Pelaksanaan program penyaluran bantuan sosial yang dilakukan dalam bentuk kemitraan UMKM, produksi jamu dan masker kain, pelonggaran kredit, dukungan bahan baku, dan distribusi paket sembako ini, pemerintah berharap nantinya peran pemerintah tersebut dapat membantu para pelaku UMKM dapat menjalankan usaha di tengah masa pandemi Covid-19. Selain itu pemerintah berharap dalam bentuk kepedulian pemerintah dengan memberikan insentif pajak bagi UMKM ini dapat menekan biaya operasional, sehingga perekonomian Indonesia dapat bertahan ketika dilanda pandemi Covid-19.

Adapun untuk mengatasi masalah yang terjadi terhadap perluasan modal kerja, telah dirancang oleh pemerintah bagi pelaku UMKM yang terdampak Covid-19, hal ini sudah bekerjasama dengan lembaga pembiayaan pada UMKM dimana belum pernah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan. Dalam hal ini sangat penting bagi pelaku UMKM yang sudah dapat diterima oleh perbankan, memenuhi kriteria dan persyaratan perbankan untuk mendapatkan kredit, penyalurannya dapat melalui program perluasan Kredit Usaha Rakyat (KUR), sedangkan bagi yang tidak memenuhi kriteria dan persyaratan perbankan untuk mendapatkan kredit, penyalurannya dapat dilakukan melalui Kredit Ultra Mikro (UMi), Permodalan Nasional Madani Membina Keluarga Sejahtera (PNM Mekar), Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), sehingga penerima bantuan permodalan yang berasal dari pemerintah dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM sebagai modal usaha di masa pandemi Covid-19.

Selain itu, terdapat beberapa strategi UMKM yang dapat dilakukan aktor birokrat di setiap daerah maupun masyarakat untuk menyelamatkan UMKM di masa pandemi Covid-19, yaitu: pertama, memberikan edukasi kepada masyarakat supaya dapat lebih mendalami dan mempelajari mengenai digital marketing, sehingga dapat berinovasi seperti membuat media promosi untuk memasarkan jenis UMKM yang dimiliki di media sosial. Kedua, meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memberikan pengarahan dan evaluasi mengenai era globalisasi dan teknologi yang dapat dimanfaatkan di saat pandemi Covid-19. Ketiga, mengembangkan inovasi serta kreativitas untuk membuat konsumen tertarik membeli suatu produk yang ditawarkan untuk dapat terjual pada masa pandemi Covid-19. Keempat, meningkatkan mutu pelayanan kepada konsumen dengan lebih berkreasi serta menjamin kebersihan dan keamanan produk supaya konsumen senang dengan produk yang ditawarkan.

Adanya upaya-upaya dan strategi yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pengembangan UMKM agar tetap bertahan di masa pandemi, membawa manfaat yang cukup signifikan bagi pelaku usaha yang berasal dari beberapa sektor swasta yang berkontribusi memberikan dana kepada para pelaku UMKM. Manfaat yang diperoleh dari adanya program PEN adalah langkah pemerintah dalam memberikan bantuan kepada UMKM dalam bentuk penataan kembali terhadap limit kredit dan subsidi

bunga dirasa sangat membantu bagi para pelaku bertahan di masa pandemi yang mengakibatkan keterpurukan baik dalam sektor perekonomian maupun pengembangan usaha.

Program tersebut yang menjadi fokus pemerintah dalam memberikan dana bantuan adalah pelaku UMKM, khususnya pelaku UMKM yang terdampak Covid-19. Melalui program PEN dengan dana sebesar Rp124 triliun, pemerintah telah menyalurkan dana tersebut kepada 12 juta UMKM. Namun, dalam penyaluran dana PEN, pemerintah harus dapat memastikan bahwa dana dukungan tersebut dapat disalurkan secara fleksibel dan tepat sasaran. Selain itu, perlu adanya dasar yang menjadi dukungan UMKM melalui subsidi bunga kredit usaha rakyat yang perlu mendapat evaluasi yang ketat dalam pelaksanaannya mengingat masih banyak UMKM yang belum tersentuh layanan perbankan.

Dampak yang ditimbulkan adanya pandemi Covid-19 terhadap pengembangan UMKM. Dampak positif dan negatif yang dihasilkan adanya pandemi Covid-19 terhadap pengembangan UMKM sangat berperan dalam keberlangsungan para pelaku usaha UMKM di Kota Semarang. Dampak positif adanya pandemi Covid-19 terhadap pengembangan UMKM yaitu beberapa sektor bisnis yang justru mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Bisnis-bisnis tersebut merupakan bisnis-bisnis yang dapat memanfaatkan penggunaan *Information and Communication Technology* (ICT) dalam kegiatan pengembangan bisnisnya dan bisnis-bisnis tersebut mampu berinovasi dan mengimplementasikan kemajuan teknologi tersebut dengan cepat dalam menghadapi situasi pandemi Covid-19 dengan mengubah kegiatan usahanya yang semula offline menjadi online. Sehingga para pelaku UMKM mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19 dan pendistribusian barang masih dapat berjalan.

Dampak negatif adanya pandemi Covid-19 terhadap pengembangan UMKM yaitu mengakibatkan sektor perekonomian mengalami kemerosotan yang sangat drastis. Adanya perubahan perilaku konsumen selama pandemi Covid-19 yang merubah perilaku bisnis para pelaku usaha. Hal ini juga mengakibatkan mayoritas kegiatan UMKM membutuhkan kehadiran fisik dari pemerintah dimana saat pandemi Covid-19 banyak aktivitas UMKM yang terhenti, yang semula laku dalam penjualan kini mengalami penurunan penyerapan produk-produk, sehingga berdampak kepada penurunan omset UMKM. Bahkan pendapatan harian UMKM turun drastis hingga mengancam keberlangsungan bisnis yang telah dibangun. Selain itu terjadi di beberapa sektor swasta yaitu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang ikut andil dalam menurunkan daya beli masyarakat.

Solusi dalam pengembangan UMKM agar dapat bertahan di pandemi Covid-19, yaitu pertama, melakukan percepatan bagi upaya perpanjangan penataan kembali terhadap limit kredit UMKM yang mengalami kendala. Kedua, mempersiapkan ide baru terkait pembiayaan, terutama berkaitan dengan investasi dan modal kerja. Ketiga, memberikan paket sembako untuk para pelaku UMKM terutama pelaku UMKM yang terdampak Covid-19. Keempat, para pelaku UMKM diberikan peluang untuk terus dapat mengembangkan produksinya seperti di sektor pertanian, industri rumah tangga, sektor makanan, dan warung tradisional dengan memerhatikan protokol kesehatan yang ketat.

Simpulan

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia membawa dampak besar terutama bagi pertumbuhan UMKM di Indonesia. Para pelaku UMKM harus bisa beradaptasi dengan pandemi dan kebijakan pemerintah untuk meminimalisir penyebaran Covid-19. Maka dari itu pelaku UMKM harus memiliki inovasi untuk mengembangkan usahanya. Dengan meningkatkan SDM, strategi pemasaran, sistem kemitraan dan pengelolaan keuangan, budaya organisasi, serta kualitas infrastruktur dan regulasi. Pemerintah juga tidak tinggal diam dalam masalah ini. Adapun strategi pemerintah supaya UMKM dapat bertahan di pandemi ini adalah dengan pemberian bantuan sosial seperti memberikan insentif pajak, perpanjangan limit kredit, dan pemberian pembiayaan modal kerja. Selain itu, pelatihan secara e-learning dan edukasi diberikan kepada masyarakat tentang digital marketing.

Referensi

- Amboningtyas, D., Taunay, E. G. P., & Rusmawati, Y. (2021). Kondisi UMKM di Kota Semarang Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pertumbuhan Ekonomi Krisis Serta Program Pemulihan Ekonomi. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian 2021*, 526–537.
- Aminy, A., & Fithriasari, K. (2021). Analisis Dampak Covid-19 Bagi UMKM Di Jawa Timur. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2020(1), 15–22. <https://doi.org/10.34123/semnasoffstat.v2020i1.646>
- Bappenas. 2021. Penurunan Penjualan UMKM Kota Semarang Akibat Pandemi Covid-19. <https://www.bappenas.go.id/id/>. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2021
- Bahtiar, R. A. (2021). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Serta Solusinya. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik, XIII*(10), 19–24. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XIII-10-II-P3DI-Mei-2021-1982.pdf
- DPKM-UGM, T. Y. (2020). Dampak Awal Pandemi COVID-19 terhadap UMKM. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Electric, M. (2021). *Strategi UMKM di Semarang dalam menghadapi Dampak Pandemi Covid-19*. <https://emea.mitsubishielectric.com/ar/products-solutions/factory-automation/index.html>
- Gultom, A. F., & Saragih, E. A. (2021). Beriman di Masa Pandemi. Medan: CV. Sinarta.
- Hadiwidjaja, R. D., & Hartati, N. (2013). Tinjauan Umum Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Indonesia : Permasalahan dan Strategi. *Kewirausahaan Dalam Multi Perspektif*, 137–151. www.depkop.go.id
- Hidayat, R. (2021). Strategi Pengembangan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19. *Universitas Muhammadiyah Palembang*.
- Literate, S., & Indonesia, J. I. (2020). *View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk*. 274–282.
- Natasya, V., & Hardiningsih, P. (2021). Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(1), 141. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i1.317>
- Niode, I. Y. (2009). Sektor UMKM di Indonesia: Profil, Masalah dan Strategi Pemberdayaan. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Oikos-Nomos*, 2(1), 1–10. <https://repository.ung.ac.id/kategori/show/uncategorized/9446/jurnal-sektor-umkm-di-indonesia-profil-masalah-dan-strategi-pemberdayaan.html>
- Rosita, R. (2020). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap UMKM Di Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v9i2.380>
- Sihombing, N. (Editor). (2020). Kebijakan Pengadaan Program Bantuan Sosial Bagi UMKM Terdampak Covid-19 di Kota Semarang. *Kertas Kerja*. <https://sea.hivos.org/news/distribusi-dan-pengadaan-program-bantuan-sosial-bagi-umkm-terdampak-covid-19-di-kota-semarang/>
- Sugiyono, D. (2013). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.
- Sugiri, D. (2020). Menyelamatkan usaha mikro, kecil dan menengah dari dampak pandemi Covid-19. *Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 19(1), 76-86.
- Widaryanti, & Pancawardani, N. L. (2020). Fokus Ekonomi. *Fokus Ekonomi*, 15(2), 477–492.